

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya. Kreativitas, inovasi, dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada pemerintah pusat. Dan yang lebih penting adalah bahwa dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung diberikan, seperti pembuatan dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dengan kata lain, penyediaan barang-barang public (*public goods*) dan pelayanan public (*service goods*) dapat lebih terjamin.

Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumber dan potensi yang tersedia dimasing-masing daerah. Selain itu, desentralisasi fiskal dapat memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran dalam pengambilan keputusan public ketingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi paling lengkap. Menurut UU 33 Tahun 2004 sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK), dana bagi hasil, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang sah.

Secara teoritis, Menurut Mardiasmo (dalam Putra, 2017) desentralisasi fiskal diharapkan dapat memberi manfaat dalam hal: (i) mengurangi kesenjangan fiskal baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (*vertical fiscal imbalance*) maupun antar daerah yang satu dengan daerah yang lain (*horizontal fiscal imbalance*); (ii) meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah; (iii) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya; (iv) peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah sehingga tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil; serta (v) mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

Adapun secara praktis, menurut Abimanyu dan Megantara (dalam Sasana, 2015) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi telah dijelaskan oleh beberapa riset. Penelitian Wibowo (dalam Badrudin, 2012) menegaskan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia selama periode 1999-2004 secara umum memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan daerah. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa era baru desentralisasi fiskal yang diluncurkan sejak tahun 2001 telah memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap pembangunan daerah dibandingkan dengan rezim sebelumnya.

Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip otonomi daerah. Tiap – tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dari masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam upaya mendukung penyelenggaraan otonomi daerah maka penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah harus dilakukan secara nyata dan bertanggung jawab serta diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil.

Hal di atas juga diperkuat oleh temuan Simanjuntak (2010) yang menegaskan bahwa potret perekonomian nasional dan tingkat kesejahteraan masyarakat cenderung meningkat dari tahun ke tahun sejalan dengan peningkatan sumber-sumber pendanaan daerah sebagai salah satu implikasi dari kebijakan desentralisasi fiskal. Kebijakan desentralisasi fiskal dapat mempengaruhi upaya penurunan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan kemiskinan didefinisikan sebagai penurunan kualitas berbagai aspek kehidupan, baik kebutuhan dasar, pendapatan rumah tangga maupun keamanan. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka menurunkan kemiskinan merupakan dampak kebijakan desentralisasi yang cukup penting (Risalam, 2013).

Salah satu indikator yang digunakan dalam melihat tingkat desentralisasi fiskal ialah rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentu didorong oleh aktivitas ekonomi yang terjadi di daerah tersebut, sehingga dapat memicu akselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sebaiknya disertai dengan peningkatan kondisi ekonomi makro dan sosial di daerah tersebut.

Ditinjau dari aspek kemiskinan di Kota Tidore Kepulauan yang dilihat dari jumlah penduduk miskin. Tingginya jumlah penduduk miskin belum menunjukkan suatu keberhasilan yang cukup memuaskan. Salah satu indikator kemiskinan terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Kondisi yang miskin menyebabkan seseorang akan mengeluarkan pendapatannya hanya untuk kebutuhan pangan atau makanan saja dan akan mengabaikan kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga tidak akan merasakan kehidupan yang layak.

Idealnya, pelaksanaan desentralisasi fiskal diharapkan mampu mengatasi permasalahan ekonomi, sehingga hal tersebut memicu makin menariknya isu mengenai pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pengaruhnya terhadap kinerja ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, menjadi penting bagi penulis untuk mengkaji apakah melalui desentralisasi fiskal di Kota Tikep mampu menjawab persoalan ekonomi yakni tingkat kemiskinan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel apa sajakah yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Tidore Kepulauan ?
2. Bagaimana dampak desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan di Kota Tidore Kepulauan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Tidore Kepulauan ?
2. Menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan di Kota Tidore Kepulauan ?

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Dapat dijadikan sebagai salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan kedepannya, khususnya kebijakan pembangunan ekonomi dalam penyediaan kesempatan kerja yang lebih banyak lagi, kebutuhan dan alokasi Investasi sehingga tingkat pengangguran dapat dikurangi dan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan.
2. Dapat memberikan bahan masukan bagi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk mengambil kebijakan dalam mengembangkan Pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan kemampuan yang ada.
3. Bagi Akademis dan peneliti selanjutnya agar dapat menjadi tambahan referensi mengenai pemahaman konsep kemiskinan serta kesempatan kerja dan dapat menjadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.